

**STRATEGI *SMART POWER* DAN PENDEKATAN *LINKAGE*
PEMERINTAH INDONESIA ERA PRESIDEN JOKOWI TERHADAP
FREEPORT MCMORAN DALAM DIVESTASI MAYORITAS SAHAM
PT. FREEPORT INDONESIA**

**Reno Ismadi
Muhammad Ridha Iswardhana S.IP., M.A**

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Bisnis, Psikologi & Komunikasi
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: enhorio11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia di era Presiden Joko Widodo yang langkahnya dimulai pada 2017. Divestasi ini menjadi agenda yang penting karena sejak tahun 1967, Indonesia selalu dirugikan terkait pengelolaan tambang PT. Freeport Indonesia karena hanya menerima keuntungan dari pajak dan royalti saja, padahal kekayaan alam harusnya digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan negara dan masyarakat.

Setelah puluhan tahun lamanya Indonesia selalu menjadi pemegang saham minoritas di PT. Freeport Indonesia, pada 2018 akhirnya Indonesia memiliki 51% saham di PT. Freeport Indonesia. Langkah-langkah negosiasi yang dilakukan oleh jajaran kabinet Joko Widodo membuahkan kesepakatan yang menguntungkan.

Bukan hanya berhasil mendapat 51% saham PTFI, tetapi juga berhasil merubah Kontrak Karya menjadi IUPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk mencapai kesepakatan tersebut, Indonesia menerapkan beberapa strategi yang menggunakan pendekatan *smart power* dan juga pendekatan teori *linkage*.

Kata kunci: Divestasi, PT. Freeport Indonesia, Joko Widodo, Kontrak Karya

**THE SMART POWER STRATEGY AND THE GOVERNMENT OF
INDONESIA'S LINKAGE APPROACH IN PRESIDENT JOKOWI'S ERA
TO MCMORAN FREEPORT IN THE MAJORITY DIVESTMENT OF PT.
FREEPORT INDONESIA**

**Reno Ismadi
Muhammad Ridha Iswardhana S.IP., M.A**

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Bisnis, Psikologi & Komunikasi
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: enhorio11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the negotiation process for the divestment of shares in PT. Freeport Indonesia in the era of President Joko Widodo, whose steps began in 2017. This divestment is an important agenda because since 1967, Indonesia has always suffered losses related to the mining management of PT. Freeport Indonesia, because it only receives profits from taxes and royalties, even though natural resources should be used as much as possible for the benefit of the state and society.

After decades, Indonesia has always been a minority shareholder in PT. Freeport Indonesia, but in 2018 Indonesia finally has a 51% stake in PT. Freeport Indonesia. The negotiation steps undertaken by the cabinet of Joko Widodo resulted in a favorable agreement.

Not only managed to get 51% shares PTFI interest, but also succeeded in changing the Kontrak Karya to IUPK. The results of this research indicate that, to reach this agreement, Indonesia adopted several strategies that used the smart power approach and also the linkage theory approach.

Keywords: *Divestment, PT. Freeport Indonesia, Joko Widodo, Kontrak Karya*